

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TENGAH

Jaka Winarna

Fakultas Ekonomi
Universitas Sebelas Maret

Abstract

The purpose of this research is to examine directly effect factors which affect financial performance in financial report of local government in Central Java.. This research was done by examining the affectation revenue, expenditure, tax, real estate, grant, capital, GDP, population, tourist and employment as independent variable, to financial performance as dependent variable.

This research used 70 financial report of local government in Central Java at 2005 – 2007 as the sample. This sample was selected using proportional purposive sampling method. Financial performace was measured by three financial ratio of local government they are Self-government Ratio, Effectively Ratio and Efficiency Ratio with 10 hypotheses were examined by regression multiple analysis.

The result of statistical analysis showed that variable of revenue, expenditure, tax, real estate, grant, GDP (Gross Domestic Product), tourist and population it can be concluded that all of variables are collectively having significant effect on financial performance, while partially, only variable revenue and expenditure having positive significant affect on financial performance.

Keywords: *financial performance, economic growth, poverty, unemployment*

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah menurut No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Setiap pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis,

adil, merata, dan berkesinambungan (Suprpto, 2006). Kewajiban tersebut bisa dipenuhi apabila Pemerintah daerah mampu mengelola potensi daerah yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi sumber daya keuangan secara optimal. Keberhasilan pengelolaan potensi daerah tersebut dapat dinilai dari kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Mardiasmo (2007: 121) menyatakan bahwa pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. *Kedua*, untuk mengalokasikan sumberdaya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Menurut Mardiasmo (2007: 127) inti dari pengukuran kinerja organisasi pemerintah adalah *value for money*. *Value for money* merupakan konsep pendekatan pengukuran kinerja biasanya dinyatakan dengan tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas. Ekonomis pengelolaan hati-hati tanpa ada pemborosan, sementara efisiensi membandingkan antara jumlah *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan, serta efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan yang harus dicapai. Mahmudi (2007: 92-96) dalam Suyono (2010) menyebutkan bahwa kinerja keuangan tersebut biasanya dinyatakan dengan rasio keuangan yang diidentifikasi dari laporan keuangan pemerintah daerah. Rasio keuangan ini dapat digunakan sebagai media untuk menginformasikan kinerja keuangan sebagaimana yang dinyatakan oleh Cohen (2006) yang menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel penelitiannya.

Cohen (2006) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menjadi moderator kinerja keuangan pemerintah daerah di Yunani dengan menggunakan variabel *gross domestic product*, populasi penduduk, variabel *real estate*, *tourist* dan *capital*. Sementara indikator kinerja keuangan yang digunakan adalah rasio keuangan yang terbagi menjadi *return on equity*, *return on assets*, *profit margin*, *current ratio*, *debt/equity*, *long term liabilities/total assets*, *assets turnover*, *operating revenues/total revenues* and *operating revenues/operating expense*. Hasil penelitian Cohen (2006) menyatakan bahwa kelima faktor yang terdiri dari *gross domestic product*, populasi penduduk, variabel *real estate*, *tourist* dan *capital* mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam sembilan rasio keuangan. Rasio profitabilitas yang dinyatakan dalam rasio ROA, ROE dan *profit margin* tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut oleh karena profitabilitas sektor pemerintah berbeda dengan sektor swasta.

Steven dan McGowen (1983) melakukan penelitian terkait indikator keuangan dan tren keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan tiga buah variabel yang terdiri dari variabel pendapatan dan pengeluaran, variabel pajak dan *real estate*, dan variabel *composite* yang terbagi menjadi *debt to revenue ratio*, *grant to revenue ratio* serta *grant to expenditure ratio*. Hasil penelitian ini adalah bahwa tren keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah penduduk dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah.

Suyono (2010) melakukan penelitian mengenai *revenue, expenditure, real estate, capital, taxes, dan grant*, menghubungkan keenam variabel tersebut dan mengkaitkannya dengan kinerja keuangan pemerintah daerah yang diprosikan dengan menggunakan lima rasio keuangan, yaitu *Current Ratio, Debt to Equity, Assets Turnover, Operating Revenues to Total Revenues, dan Operating Revenues to Operating Expenses*. Berdasarkan penelitian tersebut, Suyono (2010) memperoleh bukti empiris adanya pengaruh *revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah, semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Lima variabel lainnya, yaitu *expenditure, real estate, capital, taxes, dan grant* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia, hal ini mungkin disebabkan penggunaan data dan informasi atas laporan keuang pemerintah daerah yang mempunyai opini wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian sebagian besar memperoleh pengecualian pada aktiva, hal ini menunjukkan bahwa aktiva yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Belum banyaknya penelitian yang terkait dengan kinerja pemerintah daerah maka dalam penelitian ini akan menguji kembali hubungan antara *revenue, expenditure, real estate, capital, taxes, grant, population, tourist, GDP* dan *employment* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ada dua. *Pertama*, adanya penambahan empat variabel independen yaitu *population, tourist, GDP* dan *employment*, keempat variabel tersebut merupakan variabel independen yang dipergunakan pada penelitian Cohen (2006) dan McGowen (2001). *Kedua*, Sampel yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dipilihnya Jawa Tengah sebagai sampel karena dua variabel tambahan yakni *population, tourist, dan GDP* tidak dapat digunakan sebagai sampel oleh Suyono (2010) karena keterbatasan data yang tidak disediakan di laporan keuangan pemerintah daerah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *revenue, expenditure, real estate, capital, taxes, grant, population, tourist, GDP* dan *employment* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Government Accounting Standard Board (GASB), dalam *Concept Statements No. 2*, membagi pengukuran kinerja dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator pengukuran *service efforts*, (2) indikator pengukuran *service accomplishment*, dan (3) indikator yang menghubungkan antara *efforts* dengan *accomplishment*. *Service efforts* berarti bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang beragam. *Service accomplishment* diartikan sebagai prestasi dari program tertentu.

Efforts atau usaha adalah jumlah sumber daya keuangan dan *non-keuangan*, dinyatakan dalam uang atau satuan lainnya, yang dipakai dalam pelaksanaan suatu program atau jasa pelayanan. Pengukuran *service efforts* meliputi pemakaian rasio yang membandingkan sumber daya keuangan dan *non-keuangan* dengan ukuran lain yang menunjukkan permintaan potensial atas jasa yang diberikan.

Ada dua jenis ukuran *accomplishment* atau prestasi yaitu *outputs* dan *outcomes*. *Outputs* mengukur kuantitas jasa yang disediakan, dan *outcomes* mengukur hasil dari penyediaan *outputs* tersebut. *Outputs* dapat mengukur hanya sebatas kuantitas jasa yang disediakan, atau lebih dari itu, mengukur kuantitas jasa yang disediakan yang memenuhi standar kualitas tertentu. *Outcomes* mengukur hasil yang muncul dari *output* yang ada. *Outcomes* menjadi bermakna jika dalam penggunaannya dibandingkan dengan *outcomes* tahun-tahun sebelumnya atau dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan berfokus pada hasil pengukuran dan pelaporan kinerja dapat membantu mengomunikasikan kepada publik tentang tingkat penyelesaian unit kerja organisasi yang serupa lainnya. Lebih jauh lagi, melalui pengembangan pertanyaan umum kepada pengguna layanan dan kelengkapannya, perbandingan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kepuasan warga atau pengguna layanan atas pelayanan yang diberikan oleh beberapa unit kerja organisasi.

2.1. Pengaruh *Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Revenue merupakan pendapatan pemerintah daerah yang digunakan sebagai sumber salah satu sumber pembiayaan pembangunan di daerah (Suyono, 2006). *Revenue* yang digunakan dalam penelitian ini, mengacu pada penelitian sebelumnya, adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang benar-benar berasal dari kemampuan pemerintah daerah sehingga memberi gambaran tentang kekuatan dan kemampuan pemerintah daerah dalam penyediaan dana bagi pembangunan di daerah bersangkutan (Suyono, 2010).

Revenue mempunyai pengaruh terhadap kemampuan pemerintah untuk menghasilkan kinerja keuangan (McGowen, 1983). Jumlah *revenue* yang besar memungkinkan pemerintah untuk melakukan program kerja pemerintah daerah secara lebih leluasa sehingga mampu memberikan pelayanan yang bermutu bagi publik. Suyono (2010) memperoleh bukti empiris bahwa *revenue* pemerintah daerah di Indonesia berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Suatu pemerintah daerah yang mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi tentunya akan mempunyai jumlah kas tersedia yang cukup untuk

melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan teori tersebut diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut.

H1: Terdapat pengaruh *revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.2. Pengaruh *Expenditure* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Expenditure merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu (Suyono, 2010). Pengeluaran dalam pemerintah daerah ini disebut sebagai belanja. Belanja yang dilakukan pemerintah daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu belanja rutin dan belanja modal. Halim dan Damayanti (2008: 5) dalam Suyono (2010) menyatakan bahwa jumlah belanja modal yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih banyak melakukan pengeluaran untuk asset jangka panjang sehingga dampak pada kinerja pemerintah daerah akan dirasakan pada beberapa tahun setelah terjadi belanja modal tersebut. Adanya pengaruh *expenditure* terhadap kinerja keuangan pemerintah juga telah dibuktikan oleh McGowen (1983).

Menurut McGowen (1983) semakin besar atau tinggi jumlah *expenditure* pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pertumbuhan pembangunan pemerintah daerah tinggi sehingga ada upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat. Atas dasar uraian di atas, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut.

H2: Terdapat pengaruh *expenditure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.3. Pengaruh *Real Estate* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Real estate adalah aktiva yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang terdiri dari tanah, jalan dan bangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menghasilkan jasa pelayanan bagi masyarakat di daerah bersangkutan (Suyono, 2010). Semakin baik dan semakin banyak jumlah *real estate* yang dimiliki oleh pemerintah daerah, semakin besar kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayan publik yang baik, sesuai dengan standar minimal mutu pelayanan bagi masyarakat. Adanya peningkatan pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan meningkatkan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah sehingga dapat menciptakan kinerja keuangan yang baik bagi pemerintah.

Worthington dan Dollery (1999) dalam Suyono (2010) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah *real estate* berpengaruh terhadap pengeluaran pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil yang berbeda diperoleh Cohen (2006) yang menyatakan bahwa jumlah *real estate* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Yunani. Hasil penelitian yang diperoleh Cohen (2006) disebabkan

oleh adanya kesulitan yang dialami oleh pemerintah daerah di Yunani dalam melakukan pengukuran dan penilaian *real estate* yang disajikan dalam neraca pemerintah daerah di Yunani. Oleh karena adanya kesulitan ini, maka banyak laporan keuangan pemerintah daerah yang tidak menyajikan atau menyajikan tetapi tidak lengkap sehingga dapat mempengaruhi hasil dalam penelitian Cohen (2006) tersebut. Atas dasar teori tersebut di atas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.

H3: Terdapat pengaruh *real estate* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4. Pengaruh *Capital* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Capital atau ekuitas dana merupakan selisih antara jumlah harta dengan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah (Suyono, 2010). Jumlah *capital* yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah mempunyai dana yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah daerah sehingga mampu mencapai kinerja keuangan yang tinggi pula.

Cohen (2006) melakukan pengujian terkait pengaruh jumlah *capital* atau ekuitas dana pemerintah daerah dengan kinerja pemerintah daerah. Bukti empiris yang diperoleh adalah adanya pengaruh jumlah ekuitas pemerintah daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil berbeda diperoleh Suyono (2010) yang menyatakan bahwa *capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian yang diperoleh Suyono (2010) mungkin disebabkan penggunaan data dan informasi atas laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai opini wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan dengan opini wajar dengan pengecualian sebagian besar memperoleh pengecualian pada aktiva, hal ini menunjukkan bahwa aktiva yang disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Atas dasar teori tersebut di atas, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.

H4: Terdapat pengaruh *capital* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.5. Pengaruh *Taxes* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pajak dalam penelitian ini adalah pendapatan pajak baik pajak daerah dan bagi hasil pajak baik bagi hasil pajak daerah provinsi maupun bagi pajak pusat. Pajak yang tinggi yang diperoleh suatu pemerintah daerah dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi operasional pemerintah daerah dalam rangka menghasilkan pelayanan jasa pada masyarakat (Suyono, 2010). Bukti empiris terkait pengaruh *taxes* terhadap kinerja diperoleh Steven dan McGowen (1983) yang menyatakan bahwa tinggi rendahnya penerimaan pajak oleh suatu pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Atas dasar logika teori tersebut di atas, maka hipotesis kelima dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.

H5: Terdapat pengaruh *taxes* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.6. Pengaruh *Grant* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Grant atau hadiah atau sumbangan atau donasi adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pihak lain tanpa adanya tuntutan apapun (Suyono, 2010). Jumlah *grant* yang tinggi yang diterima oleh pemerintah akan dapat menjadi sumber pembiayaan yang cukup bagi pemerintah daerah hingga mampu menjamin kelancaran kegiatan operasional pemerintah daerah dan mampu menciptakan kinerja keuangan yang baik. Steven dan McGowen (1983) memperoleh bukti empiris bahwa *grant* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi jumlah *grant* maka semakin tinggi kinerja keuangan yang mampu dicapai oleh pemerintah daerah bersangkutan. Worthington dan Dollery (1999) dalam Suyono (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi jumlah *grant* yang diterima oleh pemerintah daerah semakin tinggi tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas kinerja keuangan pemerintah daerah. Atas dasar logika teori tersebut di atas, maka hipotesis keenam dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.

H₆: Terdapat pengaruh *grant* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.7. Pengaruh *Population* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Population yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah penduduk pada kota atau kabupaten. Pemerintah daerah harus bisa memberikan pelayanan publik yang baik. Jumlah penduduk yang banyak pada satu area tertentu meningkatkan tuntutan terhadap pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang jauh lebih baik lagi.

Athanasopoulos and Triantis (1998) dalam Cohen (2006) mengindikasikan bahwa kepadatan penduduk terkait dengan kinerja pemerintah daerah. Ketika jumlah penduduk meningkat menyebabkan peningkatan permintaan efisiensi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap publik. Cohen (2006) memperoleh bukti bahwa jumlah penduduk mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin banyak pula tuntutan pada pemerintah daerah atas pelayanan publik yang baik. Atas dasar teori di atas, maka hipotesis ketujuh dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut.

H₇: Terdapat pengaruh *population* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.8. Pengaruh *Tourist* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tourist yang digunakan dalam penelitian ini adalah keseluruhan jumlah wisatawan yang berkunjung, baik wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik. Semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung dan membelanjakan uangnya maka semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Pendapatan yang diperoleh dari wisatawan tersebut dapat dipergunakan untuk sumber pembiayaan pemerintah daerah.

Dengan tercukupinya sumber pembiayaan pemerintah daerah dapat menciptakan pelayanan publik yang semakin baik sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Cohen (2006) membuktikan bahwa perkembangan *tourist* dalam suatu daerah bisa mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Atas dasar teori diatas, maka hipotesis kedelapan dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut.

H₈ : Terdapat pengaruh *tourist* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.9. Pengaruh *GDP* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

GDP atau Gross Domestic Product dalam penelitian Cohen (2006) diyatakan kedalam GDP per daerah atau lebih dikenal dengan sebutan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Angka-angka yang disajikan oleh PDRB dapat menggambarkan kondisi ekonomi yang terjadi, baik mengenai struktur ekonomi di masa lalu, keadaan yang sedang berjalan, bahkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang. Tingkat PDRB yang tinggi mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat yang juga tinggi.

Cohen (2006) melakukan pengujian terkait pengaruh PDRB dengan kinerja pemerintah daerah. Bukti empiris yang diperoleh adalah adanya pengaruh PDRB pemerintah daerah dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. PDRB yang tinggi berkorelasi positif terhadap pendapatan asli daerah. Semakin tinggi jumlah pendapatan daerah, semakin besar dana yang tersedia bagi pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah bersangkutan mampu menyediakan pelayanan jasa pada masyarakat yang lebih baik. (Mahmudi, 2007: 128). Atas dasar logika teori tersebut di atas, maka hipotesis keenam dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.

H₉: Terdapat pengaruh *GDP* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.10. Pengaruh *Employment* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam statistik ketenagakerjaan di Indonesia kesempatan kerja merupakan terjemahan bagi *employment* yang berarti sebagai jumlah orang yang bekerja tanpa memperhitungkan berapa banyak pekerjaan yang dimiliki tiap orang, pendapatan dan jam kerja mereka. Menurut Suparmoko (2002: 114) angkatan kerja adalah penduduk yang belum bekerja namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja, dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan (Simanjuntak, 1985: 3). Tenaga kerja merupakan sumber daya potensial sebagai penggerak, penggagas dan pelaksana daripada pembangunan di daerah, sehingga dapat memajukan daerah tersebut. Ketiga aspek tersebut diharapkan menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya suatu perekonomian di daerah tersebut.

Bukti empiris terkait pengaruh *employment* terhadap kinerja diperoleh Steven dan McGowen (1983) ada hubungan yang signifikan antara *employment* terhadap kinerja

keuangan pemerintah daerah. Semakin besar tingkat *employment* yang dimiliki dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi daerah. Atas dasar logika teori tersebut di atas, maka hipotesis keenam dalam penelitian ini dapat dinyatakan seperti berikut ini.

H10: Terdapat pengaruh *employment* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk memperoleh bukti terkait ada tidaknya pengaruh *revenue, expenditure, real estate, capital, taxes, grant, population, tourist, GDP* dan *employment* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah. Data dari penelitian ini diperoleh hanya sekali pada satu batasan waktu antara tahun 2005 sampai tahun 2007 sehingga penelitian ini merupakan penelitian dengan data *cross section*.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah baik kabupaten atau kota yang berada di provinsi Jawa Tengah, tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang dipublikasikan melalui *website www.bpk.go.id*.

Sampel dari penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu berdasarkan kebijakan dari peneliti. Pertimbangan atau kriteria yang digunakan peneliti dalam penelitian ini disesuaikan dengan kriteria yang dipergunakan Suyono (2006). Kriteria pengambilan sample tersebut adalah sebagai berikut: Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dengan opini audit wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), wajar tanpa pengecualian dengan bahasa atau paragraf penjelas (*unqualified opinion with explanation language*) maupun wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*). Laporan keuangan dengan opini tidak wajar (*adverse opinion*) dan tidak memberi opini (*disclamer opinion*) tidak digunakan dalam sampel penelitian dengan pertimbangan bahwa informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut tidak wajar dan tidak dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten atau kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang mencantumkan seluruh data serta informasi yang diperlukan untuk pengukuran variabel dan analisis data untuk pengujian hipotesis dalam penelitian.

3.3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data dari penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 yang dipublikasikan melalui website www.bpk.go.id. Sumber data lain yang dipergunakan adalah data statistik yang dipublikasikan melalui website www.jateng.bps.go.id.

3.4. Variabel Penelitian dan Pengujiannya

Penelitian ini menggunakan sebelas variabel penelitian. Satu variabel, yaitu kinerja keuangan, merupakan variabel dependen. Tujuh variabel menjadi variabel independen, yaitu *revenue*, *expenditure*, *real estate*, *capital*, *taxes*, *grant*, *population*, *tourist*, *GDP* dan *employment*. Variabel-variabel tersebut untuk selanjutnya akan diuji secara sistematis.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan tersebut diukur dengan menggunakan lima rasio keuangan, agar dalam pengambilan kesimpulan tidak bias maka kelima rasio keuangan tersebut difaktorkan menjadi satu dengan menggunakan program SPSS versi 16.0. Satu faktor yang diperoleh dari penggabungan tersebut merupakan proksi kinerja keuangan pemerintah daerah yang selanjutnya digunakan sebagai data untuk variabel dependen penelitian. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Suyono (2010). Lima rasio keuangan tersebut adalah *Current Ratio* (CR), *Debt to Equity* (DER), *Assets Turnover* (AT), *Operating Revenues to Total Revenues* (ORTR), dan *Operating Revenues to Operating Expenses* (OROE).

Variabel independen dalam penelitian ini menggunakan variabel independen sebagaimana digunakan oleh Cohen (2006) dan Suyono (2010) yang terdiri dari: *Revenue* (REV), *Expenditure* (EXP), *Real Estate* (REAL), *Capital* (CAP), *Taxes* (TAX), *Grant* (GRANT), *Population* (POP), *Tourist* (TOURIST), *Gross Domestic Product* (GDP), dan *Employment* (EMP.)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda (*multiple regression model*) untuk menguji pengaruh REV, EXP, RE, CAP, TAX, GRANT, POP, TOURIST, GDP, dan EMP terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam rasio CR, DER, AT, ORTR dan OROE. Model penelitian ini sebagai berikut:

$$FP = \beta_0 + \beta_1 REV + \beta_2 EXP + \beta_3 REAL + \beta_4 CAP + \beta_5 TAX + \beta_6 GRANT + \beta_7 POP + \beta_8 TOURIST + \beta_9 GDP + \beta_{10} EMP + e$$

Keterangan :

FP = *Financial Performance* (CR, DER, AT, ORTR)

	dan OROE),
β_0	= konstanta,
$\beta_1 - \beta_8$	= koefisien regresi,
REV	= <i>Revenue</i> ,
EXP	= <i>Expenditure</i> ,
REAL	= <i>Real Estate</i> ,
CAP	= <i>Capital</i> ,
TAX	= <i>Taxes</i> , dan
GRANT	= Sumbangan atau hadiah, sumbangan dan subsidi
POP	= <i>Population</i>
TOURIST	= <i>Tourist</i>
GDP	= <i>Gross Domestic Product</i> , dan
EMP	= <i>Employment</i>

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Deskriptif Statistik Atas Data

Data yang diperoleh menggambarkan data yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standar deviasi data. Deskripsi data penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Statistik Data Penelitian

<i>Variable</i>	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
REK (dalam jutaan)	70	0,6179	4,4520	1,1232	0,4214
RES (dalam jutaan)	70	0,1681	12,4659	3,9312	3,7286
RKM (dalam jutaan)	70	0,0446	0,7062	0,1250	0,1271
REV (dalam jutaan)	70	15192,711	2932805,175	166992,425	539367,048
EXP (dalam jutaan)	70	9955,716	2660482,050	291715,199	459592,234
REAL (dalam jutaan)	70	367770,298	13271213,260	2219401,386	2844361,178
CAP (dalam jutaan)	70	481205,531	16195749,638	2553633,050	3235703,319
TAX (dalam jutaan)	70	5792,993	2784363,946	173103,009	502730,606
GRANT (dalam jutaan)	70	84,705	790214,165	30573,980	96842,540
GDP (dalam jutaan)	70	908763,620	159110253,790	10371411,782	30204665,213
POP (dalam ribuan)	70	129,952	29900,114	2045,526	5254,309
EMPLOY (dalam ribuan)	70	23,433	16304,058	1091,129	3125,717
<i>Valid N (listwise)</i>	70				

4.2 Analisis Data

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian data yang terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

Table 2. Uji Multikolinieritas

<i>Variable</i>	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	<i>Kesimpulan</i>
TOURIST	0,908	1,101	Tidak terjadi multikolinieritas
LogREV	0,121	8,261	Tidak terjadi multikolinieritas
LogEXP	0,628	1,592	Tidak terjadi multikolinieritas
LogREAL	0,055	18,069	Terjadi multikolinieritas
LogCAP	0,049	20,584	Terjadi multikolinieritas
LogTAX	0,211	4,747	Tidak terjadi multikolinieritas
LogGRANT	0,696	1,438	Tidak terjadi multikolinieritas
LogPOP	0,156	6,398	Tidak terjadi multikolinieritas
LogGDP	0,138	7,222	Tidak terjadi multikolinieritas
LogEMPLOY	0,233	4,298	Tidak terjadi multikolinieritas

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk variabel *real estate* dan *capital* dalam model regresi kurang dari 0,1 dan nilai VIF untuk variabel tersebut lebih besar dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terjadi gejala multikolinieritas. Dalam Ghozali (2006) dijelaskan salah satu cara untuk mengobati multikolinieritas adalah dengan mengeluarkan variabel independen yang memiliki nilai korelasi tinggi dari model regresi. Nilai korelasi tertinggi dimiliki variabel *capital* sehingga harus dikeluarkan dari model regresi.

Uji signifikansi-t dimaksudkan untuk pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis penelitian ini. Selain untuk menguji pengaruh tersebut, uji ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tanda koefisien regresi masing-masing variabel independen sehingga dapat ditentukan arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 3. Uji Signifikansi-t

Variabel	Koefisien	t-value	Sig.
KONSTANTA	-0,719	-0,403	0,688
LogREV	-1,921	-6,847	0,000
LoEXP	1,986	21,384	0,000
LogREAL	-0,188	-1,207	0,232
LogTAX	0,157	0,777	0,440
LogGRANT	0,020	0,249	0,804

LogPOP	0,301	1,046	0,300
LogGDP	-0,251	-0,956	0,343
LogEMPLOY	0,173	0,941	0,350
TOURIST	0,111	1,201	0,234

Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian regresi berganda untuk model yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian data di atas mengindikasikan bahwa hanya variabel REV dan EXP berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Hasil ini diindikasikan oleh nilai probabilitas untuk variabel REV dan EXP sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian 5%. Hasil pengujian signifikansi-t di atas juga mendasari penyusunan model penelitian yang dapat dirumuskan seperti berikut ini.

$$FP = -0,719 - 1,921(REV) + 1,986(EXP) - 0,188(REAL) + 0,157(TAX) + 0,020(GRANT) - 0,251(GDP) + 0,301(POP) + 0,173(EMPLOY) + 0,111(TOURIST)$$

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui terdapat pengaruh *revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Steven dan McGowen (1983), Groves *et al.* (2001), dan Suyono (2010). Suatu pemerintah daerah yang mampu mencapai jumlah pendapatan daerah yang tinggi akan mempunyai jumlah kas yang cukup untuk melakukan pembiayaan kegiatan program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah (Suyono, 2010). Hasil penelitian ini juga menunjukkan terdapat pengaruh *expenditure* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan hasil penelitian Steven dan McGowen (1983), Groves *et al.* (2001) namun kontradiktif dengan hasil penelitian Suyono (2010). Perbedaan hasil penelitian ini mungkin dikarenakan perbedaan penggunaan rasio untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin besar jumlah *expenditure* pemerintah daerah mengindikasikan bahwa pertumbuhan pembangunan pemerintah daerah tinggi sehingga ada upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat (Steven dan McGowen, 1983).

Jumlah *real estate* tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, sesuai dengan penelitian Suyono (2010) namun tidak sesuai dengan penelitian Cohen (2006). Perbedaan hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh penggunaan data dan informasi atas laporan keuangan pemerintah daerah yang mempunyai opini wajar dengan pengecualian khususnya untuk nilai atas aktiva yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat dinyatakan bahwa aktiva yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tidak wajar berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

Terkait dengan hasil pengujian jumlah *taxes* dan *grant* mengindikasikan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil ini kontradiktif dengan penelitian yang dilakukan Steven dan McGowen (1983) dan Groves *et al.* (2001). Hasil pengujian mengindikasikan bahwa jumlah pajak daerah dan *grant* yang diterima oleh pemerintah daerah tidak berpengaruh pada kinerja. Hal ini kemungkinan dapat disebabkan oleh jumlah pajak daerah dan *grant* yang kecil sehingga tidak mampu mendorong pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, jumlah pajak dan *grant* yang tidak berpengaruh pada kinerja tersebut dapat disebabkan oleh penggunaan hasil pajak dan *grant* yang kurang atau tidak efisien sehingga tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan pengujian ini juga dapat diketahui bahwa *population*, *tourist*, *employment*, dan GDP tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Cohen (2006). Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mungkin dikarenakan masih banyaknya penduduk yang tidak patuh pajak, penghasilan yang diperoleh masyarakat juga cenderung kecil sehingga tidak termasuk dalam penghasilan kena pajak. Selain itu, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah belum bisa dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Pertambahan jumlah wisatawan yang berkunjung juga tidak dapat memberikan kontribusi terhadap penambahan jumlah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah. Hal ini mungkin dikarenakan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu mengembangkan sektor pariwisata dan memberikan pelayanan publik secara maksimal, sehingga minat wisatawan untuk berkunjung dan membelanjakan uangnya masih rendah. Jumlah pekerja memiliki pendapatan yang kecil sehingga mengakibatkan pertambahan GDP yang kecil, pajak yang dipungut dari penghasilan tersebut juga kecil, sehingga tidak mampu mendorong pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan tiga rasio penialaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan rasio efektivitas dipengaruhi oleh jumlah *revenue* dan *expenditure* pemerintah daerah. Hasil pengujian data juga mengindikasikan bahwa jumlah *taxes*, *grant*, *real estat*, *population*, *tourist*, *employment*, dan GDP tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pengujian data tanpa memisahkan ke dalam kriteria tertentu, dan berkurangnya variabel independen yaitu *capital* dari model penelitian. Adapun saran bagi penelitian berikutnya adalah memisahkan sampel penelitian berdasarkan kriteria tertentu, menambahkan jumlah sampel penelitian dengan memasukkan daerah yang lebih luas, dan

Menambah variabel lain yang memiliki hubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

- Azhar, M. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis. USU
- Bastian, Indra. 2001. *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Cohen, Sandra. 2006. Identifying the Moderator Factor of Financial Performance in Greek Municipal. *Annual Conference*. 5th. HFAA. Thessaonica.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Groves, Sanford M., W. M. Godsey, dan M. A. Shulman. 2001. Financial Indicator for Local Government. *Public Finance International City Management Association*. 9: 243-255.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutomo, Wiramono Tri. 2006. *Analisis Rasio Keuangan Sebagai Pengukur Kinerja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Skripsi. UNS
- Mardiasmo. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Pemerintah Nomor: 24. Tahun 2005. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____. Nomor: 57. Tahun 2005. *Tentang Hibah Kepada Daerah*.
- _____. Nomor: 58. Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- _____. Nomor: 8. Tahun 2006. *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Rahardjo, Wiharta. 2010. *Pengaruh Posisi Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis. UNS
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methodhs for Business - Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Steven, J. dan R. McGowen. 1983. Financial Indicators and Trends for Local Government: A State-Based Policy Perspective. *Policy Study Rivew*. 2(3): 33-51.

Suyono. 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis. UNS.

Ugroseno, Satriyo S. 2006. *Pengaruh PDRB, Jumlah Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Sendiri (PADS) Kota Surakarta Periode Triwulanan Tahun 1992-2003*. Skripsi. UNS

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah direvisi melalui Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Departemen Dalam Negeri RI, Jakarta.

www.bpk.go.id

www.jateng.bps.go.id